

Islamic Education Empowerment Politics through Entrepreneurship and Reduction of Islamic Religious Education Values to Establish Madani Society

Ni'matuz Zuhroh

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Malang, East Java, Indonesia
Jl. Gajayana No 50 Malang

Abstract: The concept of empowerment can be regarded as a response to the reality of disempowerment. The subordinates are the powerless. There are two main possibilities of power loss; what is described as not having the strength and the second is so-called loss of strength. Those two forms are very different that can be experienced by most of the Institute of Islamic Education in Indonesia from the lowest education levels to the highest education levels. Then, we could find the motto *"the conditions of Islamic education are neither alive nor dead / laa yamuutu walaah yahya"*. Humans have been at a time when people can be named civilized society or it could be called civil society. Civilized society / civil society is defined as people who understand social justice, egalitarianism, pluralism, rule of law, and social supervision. Social justice is an act of justice to everyone and freeing all the oppression. Egalitarianism is a good similarity without discrimination of ethnicity, religion, tribe. Pluralism is an attitude of respect for the plurality sincerely accept as a grace and virtue. The rule of law is put law above everything else and set regardless of the "top" and "bottom". The above mentioned conditions can be achieved by the internalization of the entrepreneur values and the value reduction of Islamic religious education in building the professional and reliable Islamic education institutions so as to establish the civil society.

Keywords: Empowerment, Entrepreneur, Reduction of Value of Islamic Religious Education, and Madani Society

A. Pendahuluan

Madrasah yang dalam hal ini identik dengan lembaga Pendidikan Islam dalam khazanah kehidupan manusia Indonesia merupakan fenomena budaya yang telah berusia satu abad lebih, bahkan bukan suatu hal yang berlebihan, madrasah telah menjadi satu wujud entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya. Secara berangsur tapi pasti ia telah memasuki arus utama pembangunan bangsa abad ke-21 ini (A.Malik Fadjar;230). Pandangan terhadap sistem Pendidikan Islam, yang akhirnya dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua dalam konstelasi sistem pendidikan Indonesia, walaupun dalam undang-undang sistem pendidikan nasional menyebutkan Pendidikan Islam merupakan sub sistem pendidikan nasional. Tetapi predikat keterbelakangan dan kemunduran tetap melekat padanya, bahkan pendidikan Islam sering "dinobat" hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu atau miskin. Para pengamat dan pengkaji ke Islaman melihat fenomena Islam di pondok pesantren (dan sudah barang tentu juga di Indonesia) terus bergerak ke arah proses ortodoksi, atau pengantar peradaban di Indonesia menyebut adanya proses bergerak, dari Islam yang bercorak mistik menuju ke Islam Sunni. Pengelolaan pendidikan Islam dengan sistem madrasah memungkinkan cara pembelajaran secara klasikal. Hal ini berbeda dengan cara yang berkembang di pondok pesantren yang semula telah membaku, yakni yang bersifat individual seperti terdapat pada sistem sorogan dan wetonan. Pengelolaan sistem madrasah juga memungkinkan adanya pengelompokan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan Islam yang penyampaian diberikan secara

bertingkat-tingkat. Pengelompokan ini sekaligus memperhitungkan rentang waktu yang dibutuhkan. Kalau dibahasakan secara teknis kependidikan sekarang, maka sistem madrasah mengorganisasi kegiatan kependidikannya dengan sistem kelas-kelas berjenjang dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelajaran sudah dipolakan. Tentunya seiring berkembangnya waktu Pendidikan Islam berlangsung melalui Proses operasional menuju pada tujuan yang diinginkan, memerlukan model yang konsisten yang dapat mendukung nilai-nilai moral spritual dan intelektual yang melandasinya sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi.

B. Pembahasan.

1. Politik Pemberdayaan Pendidikan Islam melalui Enterpreneur.

Kelemahan pendidikan Islam dilihat justru terjadi pada sektor utama, yaitu pada konsep, sistem dan kurikulum, yang dianggap mulai kurang relevan dengan kemajuan peradaban umat manusia dewasa ini atau tidak mampu menyertakan disiplin-disiplin ilmu lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kenyataannya yang ada ini memasukkan pendidikan Islam dalam klasifikasi yang belum dapat dikatakan telah berjalan dan memberikan hasil secara memuaskan (Ni'matuz Zuhroh; 4). Pemberdayaan (*empowerment*) menjadi ruh dari konsep pengembangan masyarakat. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pembedayaan. Dalam catatan Ife (1995:56) pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged*). "*Empowerment aim to increase the power of the disadvantaged,*" tulis Ife. Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni *power* dan *disadvantaged*.

Strategi Pemberdayaan Menurut Ife (1995:63) setidaknya ada tiga strategi yang dapat diterapkan untuk dapat memberdayakan suatu masyarakat, yakni : perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*), aksi sosial politik (*social and political action*), dan peningkatan kesadaran dan pendidikan (*education and consciousness raising*).

Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan dilakukan untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Ketidakberdayaan seringkali terjadi karena adanya sumber kehidupan yang terbatas. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi karena faktor politik. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyat ditentukan oleh kekuatan politik. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang besar dalam memperoleh kondisi keberdayaan. Terakhir, strategi pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kesadaran.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi.

Perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan.

Pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah. Pada prinsipnya, pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Ada 4 konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
 - b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
 - c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
 - d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
2. Konsep-konsep pemberdayaan dan pembangunan ekonomi.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi;
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran;

- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan
- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu **masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai**. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Secara sederhana pembangunan selalu didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis menuju keadaan sosial ekonomi yang lebih baik atau yang lebih modern. Batasan tersebut jelas menggambarkan bahwa pembangunan merupakan suatu gejala sosial yang berdimensi banyak dan haruslah didekati dari berbagai disiplin ilmu.

Salah satunya yang mendukung pemikiran tersebut adalah Tjokroamidjojo, 1990, dalam tulisan Bambang sutrisno, Akses Peran Serta Masyarakat, mengemukakan bahwa pembangunan negara-negara di Asia hanya bisa berlangsung bila persyaratan-persyaratan politis dan sosial terpenuhi. Disamping itu Michael P. Todaro dalam Pengembangan Koperasi, Kumpulan karangan Thoby Mutis, mengemukakan pula bahwa Ilmu ekonomi hendaknya berdimensi luas tidak hanya berkaitan upaya melakukan pilihan terhadap sumberdaya yang terbatas, meminimalisasi biaya, memaksimalkan hasil atau manfaat, tetapi harus pula menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya agar mayoritas masyarakat miskin di negara berkembang mendapat perbaikan taraf hidup sejalan dengan realisasi dari beraneka ragam potensi mereka sebagai manusia.

Selain itu Coralie Bryant & Louise G White dalam bukunya Manajemen Pembangunan mengemukakan pula bahwa pembangunan merupakan suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Hal tersebut mempunyai beberapa implikasi tertentu yaitu pertama, memberikan perhatian terhadap kapasitas, yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan tersebut, kedua pembangunan harus mencakup keadilan, perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan akhirnya pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya.

Dari berbagai konsep tersebut terlihat bahwa pembangunan tidak dapat didekati hanya dengan perubahan ekonomi, tapi secara umum pembangunan juga harus mampu menciptakan suatu kondisi yang dapat menjamin keadaan sosial masyarakat yang berkeadilan, kapasitas masyarakat yang dapat berkembang dengan pemberian wewenang dan kekuasaan, serta lingkungan yang terjamin kesalingtanggungannya.

3. Nilai-Nilai Kewirausahaan.

Masing-masing karakteristik kewirausahaan memiliki makna-makna dan peragai tersendiri yang disebut nilai. Milton Roakeach (1973: 4), membedakan konsep

nilai menjadi dua, yaitu nilai sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan nilai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan objek. Pandangan pertama, manusia mempunyai nilai, yaitu sesuatu yang dijadikan ukuran baku bagi persepsinya terhadap dunia luar. Menurut Sidarta Poespadibrata (1993: 91), watak seseorang merupakan sekumpulan peraga yang tetap. Sekumpulan peraga yang tetap tersebut dapat dipandang sebagai sistem nilai (Rockeach, 1973). Oleh karena itu, watak dan peraga yang melekat pada kewirausahaan dan menjadi cirri-ciri kewirausahaan dapat dipandang sebagai system nilai kewirausahaan.

Nilai-nilai kewirausahaan diatas identik system nilai yang melekat pada system nilai manajer. Seperti dikemukakan oleh Andreas A. Danandjaja(1986), Andreas Budi Hardjo(1991), dan Sidharta Poespadibrata (1993), dalam system nilai manajer terdapat 2 kelompok nilai, yaitu :

a. System nilai pribadi, terdiri dari:

1) Nilai primer pragmatig

Dalam nilai primer pragmatig terkandung beberapa unsur, diantaranya perencanaan, prestasi, produktifitas, kemampuan, percakapan, kreativitas, kerja sama, dan kesempatan. Dalam kewirausahaan, system nilai pragmatig dapat dilihat dari watak, jiwa, dan perilaku.

2) Nilai primer moralistic,

Dalam nilai moralistic terkandung unsur-unsur keyakinan, jaminan, martabat pribadi, kehormatan, dan ketaatan. Dalam kewirausahaan, nilai primer moralistic meliputi keyakinan atau kepercayaan diri, kehormatan, kerja sama, kejujuran, keteladanan, dan keutamaan.

3) Nilai prixmer afektif, dan

4) Nilai baruan.

b. System nilai kelompok/ organisasi.

Sujuti Jahya (1977), membagi nilai-nilai kewirausahaan tersebut ke dalam 2 dimensi nilai berpasangan, yaitu:

a. Pasangan system kewirausahaan yang berorientasi materi dan non materi.

b. Niali-nilai yang berorientasi pada kemajuan dan nilai-nilai kebiasaan.

Adapun nilai hakiki kewirausahaan dapat dilihat sebagaimana tersebut diterangkan dibawah ini :

1) Percaya diri

Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas/pekerjaan. Dalam praktik, sikap dan kepercayaan ini sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan ketidaktergantungan. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan.

Kepercayaan diri ini bersifat internal, sangat relatif, dan banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang percaya diri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sistematis, terencana, efektif, dan terencana. Kepercayaan diri

juga selalu di tunjukkan oleh ketenangan, ketekunan, kegairahan, dan kemantapan dalam melakukan pekerjaan.

2) Berorientasi pada tugas dan hasil

Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan berinisiatif. Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai sesuatu. Untuk memulai diperlukan adanya niat dan tekad yang kuat serta karsa yang besar. Sekali sukses atau berprestasi, maka sukses berikutnya akan menyusul sehingga usahanya akan maju dan berkembang. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila terdapat inisiatif. Perilaku inisiatif ini biasanya diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman selama bertahun-tahun, dan pengembangannya diperoleh dengan disiplin diri, berfikir kritis, tanggap, dan semangat berprestasi.

3) Keberanian mengambil resiko

Kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Menurut Angelita S. Bajaro, seorang wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang selalu ingin menjadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk lebih mencapai kesuksesan atau kegagalan dari pada usaha yang kurang menantang. Oleh sebab itu, wirausaha kurang menyukai resiko yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Resiko yang terlalu rendah akan memperoleh sukses yang relative rendah. Sebaliknya, resiko yang tinggi kemungkinan memperoleh sukses yang tinggi, tetapi dengan kegagalan yang sangat tinggi.

Menurut Meredith (1996: 38), ada dua alternatif, yaitu alternatif yang mengandung resiko dan alternatif yang konserfatif. Pilihan terhadap resiko ini sangat berpengaruh pada:

- a) Daya tarik setiap alternative
- b) Siap untuk mengalami kerugian
- c) Kemungkinan relative untuk sukses atau gagal

Pemilihan sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha untuk mengambil resiko. Kemampuan untuk mengambil resiko ditentukan oleh :

- a) Keyakinan pada diri sendiri
- b) Kesiediaan menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan
- c) Kemampuan untuk menilai situasi resiko secara realistis

Di atas, dikemukakan bahwa pengambilan resiko berkaitan dengan kepercayaan diri sendiri. Artinya, semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan sendiri, maka semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan untuk mempengaruhi hasil dan keputusan, dan semakin besar pula kesiediaan seseorang untuk mencoba apa yang menurut orang lain sebagai resiko. Jadi, pengambil resiko ditemukan pada orang-orang yang inofatif dan kreatif yang merupakan bagian terpenting dari perilaku kewirausahaan.

4) Kepemimpinan

Seorang wirausahaan yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Dengan menggunakan kemampuan kreatifitas dan inovasi, ia selalu menampilkan barang dan jasa yang dihasilkannya dengan lebih cepat, lebih dulu, dan segera berada di pasar. Ia selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Contoh sederhana adalah, Toyota yang hampir setahun sekali menghasilkan produk mobil baru. Disebut produk mobil kijang baru karena penampilan, interior, bentuk, dan aksesorisnya berbeda dengan yang sudah ada. Akibatnya nilai jual kijang baru lebih mahal dari pada mobil yang lain. Inilah nilai tambah yang diciptakan oleh wirausaha yang memiliki kepeloporan

5) Berorientasi Kemasa Depan

Orang yang berorientasi kemasa depan adalah orang yang memiliki respektif dan pandangan kemasa depan sehingga ia selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya. Kuncinya adalah kempuan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada saat ini.

6) Keorisinalan: Kreatifitas dan Inovasi

Wirausaha yang inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-cara baru yang lebih baik (Yuyun Wirasmita, 1994: 7) dengan ciri-ciri:

- a) Tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik.
- b) Selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaan.
- c) Selalu ingin tampil beda atau memanfaatkan perbedaan.

Kreatifitas adalah kemampuan menciptakan gagasan dan menemukan cara baru dalam melihat permasalahan dan peluang yang ada. Sedangkan inovasi adalah kemampuan mengaplikasikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk memakmurkan kehidupan masyarakat.

Senada dengan itu di dukung dengan hasil Penelitian Ni'matuz Zuhroh yang berjudul pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi Siswa IPS SMAN 3 Malang diilustrasikan di Tabel 1:

Tabel 1: Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_1)	Nilai	Kesimpulan
1.	a. Tidak ada pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap perubahan perilaku ekonomi siswa b. Ada pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap perubahan perilaku ekonomi siswa	Sig.t = 0,027 Prob α = 0,05	H_0 ditolak H_1 diterima
2.	a. Tidak ada pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap perubahan perilaku sosial siswa. b. Ada pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap perubahan perilaku sosial siswa	Sig.t = 0,019 Prob α = 0,05	H_0 ditolak H_1 diterima

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian hipotesis nol (H_0) pertama ditolak. Nilai signifikansi t untuk variabel perubahan perilaku ekonomi adalah 0,027 dan nilai tersebut lebih kecil dari probabilitas α yang ditetapkan yaitu 0,05 ($0,027 < 0,05$). Dengan demikian pengujian menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa pembelajaran kewirausahaan berpengaruh terhadap perubahan perilaku ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis nol (H_0) kedua juga ditolak. Nilai signifikansi t untuk variabel perubahan perilaku sosial adalah 0,019 dan nilai tersebut lebih kecil dari probabilitas α yang ditetapkan yaitu 0,05 ($0,019 < 0,05$). Dengan demikian pengujian menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa pembelajaran kewirausahaan berpengaruh terhadap perubahan perilaku sosial.

Jadi berdasarkan hasil uji regresi linear berganda secara parsial, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kewirausahaan berpengaruh terhadap perubahan perilaku ekonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Demikian juga pembelajaran kewirausahaan berpengaruh terhadap perubahan perilaku sosial dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Hasil analisis dapat diamati di Tabel 2:

Tabel 2: Hasil Analisis Regresi Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.040	3.694		6.507	.000
Pembelajaran Kewirausahaan	.295	.204	.273	1.446	.027

a Dependent Variable: Perilaku Ekonomi

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.303	4.598		2.458	.000
Pembelajaran Kewirausahaan	.322	.254	.241	1.268	.019

a Dependent Variable: Perilaku Sosial

Berdasarkan tabel 4.7 diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1$$

$$\text{Perubahan Perilaku Ekonomi (Y1)} = 24,040 + 0,295X$$

$$\text{Perubahan Perilaku Sosial (Y2)} = 11,303 + 0,322X$$

Dari persamaan garis regresi diatas, dapat diinterpretasi pengaruh variabel bebas (X) sebagai berikut:

1. Harga koefisien konstanta = 24,040. Hal ini berarti bahwa apabila nilai pembelajaran kewirausahaan (X) di obyek penelitian sama dengan nol (0), maka perubahan perilaku ekonomi siswa (Y1) akan sebesar 24,040.

2. Harga koefisien $b = 0,295$. Hal ini berarti bahwa apabila nilai pembelajaran kewirausahaan (X) mengalami kenaikan satu poin, maka besarnya perubahan perilaku ekonomi (Y1) akan meningkat sebesar 0,295.
3. Harga koefisien konstanta = 11,303. Hal ini berarti bahwa apabila nilai pembelajaran kewirausahaan (X) di obyek penelitian sama dengan nol (0), maka perubahan perilaku sosial siswa (Y2) akan sebesar 11,303.
4. Harga koefisien $b = 0,322$. Hal ini berarti bahwa apabila nilai pembelajaran kewirausahaan (X) mengalami kenaikan satu poin, maka besarnya perubahan perilaku sosial (Y2) akan meningkat sebesar 0,322

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nol (H_0) terlihat bahwa semua hipotesis nol ditolak (ada pengaruh). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jalur pengaruh yang berhasil membuktikan atau mendukung teori yang digunakan dalam merumuskan hipotesis alternatif (H_1). Adapun kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3: Hasil Koefisien Diterminasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.273 ^a	.074	.039	3.54343	.074	2.092	1	26	.160	2.048

- a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Kewirausahaan
 b. Dependent Variable: Perilaku Ekonomi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.241 ^a	.058	.022	4.41024	.058	1.607	1	26	.216	1.871

- a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Kewirausahaan
 b. Dependent Variable: Perilaku Sosial

Hasil analisis korelasi yang diperoleh dari *output* regresi menunjukkan pengaruh variabel pembelajaran kewirausahaan diperoleh nilai R Square = 0,074. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai perubahan perilaku ekonomi yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 7,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar model regresi yang diperoleh. Sementara untuk pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap perubahan perilaku sosial diperoleh nilai R Square = 0,058. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai perubahan perilaku sosial yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 5,8% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar model regresi yang diperoleh.

4. Politik Pemberdayaan Pendidikan Islam melalui Reduksi Nilai Pendidikan Agama Islam mewujudkan Masyarakat Madani.

Nilai-nilai yang tereduksi dalam Pendidikan Agama Islam baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun diluar Sekolah. Baik yang diberikan secara langsung oleh para pendidik/dai maupun yang lewat berbagai media, semuanya mengandung nilai-nilai yang sangat dibutuhkan untuk membangun karakter. Secara eksplisit peran dan fungsi PAI dalam mengajarkan termuat dalam tujuan PAI sebagai berikut “

Pendidikan Agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Depdiknas, 2003:16).

Iman dan taqwa dan berakhlak mulia merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pendidikan karakter. Dari ketiga nilai dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi lebih operasional sesuai dengan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjadi manusia yang berkarakter, misalnya akhlak mulia dikaitkan dengan nilai-nilai universal yang mencakup : sifat jujur, amanah, tanggung jawab, cinta kasih, berpandangan luas, toleransi dan suka damai. (Achmadi;66).

C. Kesimpulan.

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa ada nilai dasar atau internalisasi politik pemberdayaan Pendidikan Islam melalui *Enterpreneur dan reduksi nilai Pendidikan Agama Islam* yakni “ nilai universal berkenaan kemanusiaan” (*humanisme*). Banyak nilai yang merupakan muatan dari nilai kemanusiaan, yang secara garis besar dapat ditinjau dari dua dimensi: (1) dimensi sosial yaitu nilai kemanusiaan yang mendasari hubungan baik dengan sesama manusia (*hablun minannas*), (2) dimensi individual yaitu nilai kemanusiaan yang mendasari terpeliharanya harkat dan martabat pribadi seseorang. Adapun nilai-nilai universal- kemanusiaan dari kedua dimensi tersebut yang dirasa tereduksi dalam Pendidikan Agama Islam adalah pertama nilai kemanusiaan misalnya menghargai hak asasi manusia, damai dan kedamaian. Kedua dimensi yang kedua individual; (kejujuran dan amanah, kebebasan dan berfikir). Dengan demikian kalau hal tersebut diatas maka terwujudkan wujudkan Masyarakat madani yaitu masyarakat yang mapan secara jasmani dan rohani, yang mapan secara ekonomi dan sumber daya dukung yang lainnya atau dengan istilah masyarakat yang di dalam negara “ Baldatun Toyyibun Ghofurun”.

Daftar Pustaka

- Ambrosino, Rosalie, Joseph Heffernan, Guy Shuttlesworth and Robert Ambrosino (2005), social Work and Social Welfare an Introduction, USA: Thomson/ Brook/Cole
- Achmadi, Reduksi Nilai Pendidikan Agama Islam, Trusmedia, Yogyakarta, 2013.
- A.Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Banks, Sarah (2001), Ethics and Values in Social Work, Second Edition, New York: Palgrave.
- Barker, Robert L.(2003), The Social Work Dictionary, edisi kelima, USA: NASW Press.
- Dennis Saleeby (2006), The Strengths Perspektive in Social Work Practice 4 th edition, USA: Pearson Education Inc.
- Dr.H.R. Mardiono, MPA, jurnal bahan kuliah S3 UB Malang
- Herimanto & winarto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Himawan S.Pambudi, dkk, politik Pemberdayaan, Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Ife, Jim (1995), Community Development, Creating Community Alternatives- Vision, Analysis and Practice, Australia: Longman.
- Midgley, James & Michelle Livormore (2005), Development Theory and Community Praktice, dalam Weil, Marie Editor, Volume 3: LP USA: Macmillan.

Masyhuri, (2008-2009). *Optimalisasi Distribusi Singkong yang Berimbang (balance) Guna Mendukung Ketahanan Pangan.*(TAHUN I)

Ni'matuz Zuhroh, Pengantar Pembangunan, UMM Press 2004.

Ni'matuz Zuhroh, Sosok Pendidikan Ideal di Era Globalisasi, International Seminar, State Islamic university UIN Malang 2008.

Soelaeman munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Edisi Revisi*, PT.Aresco,

Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial ElSaQ Press, 2005

Yusuf Al Qaradhawi, Islam Abad 21, Pustaka Alkausar, Jakarta 2000

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Masalah ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Masalah_ekonomi)

<http://blog-indonesia.com/blog-archive-6323-325.html>